

Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Peradaban Ekonomi Islam

Dian Pertiwi¹⁾, Ris'an Rusli²⁾, Amilda³⁾

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

pertiwi.dian_uin@radenfatah.ac.id,
risanrusli_uin@radenfatah.ac.id dan
amildasani@radenfatah.ac.id

Abstract: *This paper sees Ibn Khaldun as one of the Islamic thinkers who made changes, not only as a sociologist who changed through his writings which are very useful to date, this has a very valuable contribution to the preparation of Islamic history. Ibn Khaldun is known as a Muslim sociologist and historian who uses history as an analytical tool to deduce and make explanations about socio-economic problems. He has a deep understanding of the laws of cause and effect in order to discover the natural laws that govern society. In the field of economics, Ibn Khaldun wrote a lot about matters which later became the basis for modern economic theory, ranging from microeconomics to international trade. Some of the economic concepts that have been discussed include: value, price, money, growth, development, distribution, public finance, rent, business cycles, political economy and the benefits of trade. The concept of development that he offers is formulated in eight main advices, which are interrelated with one another. The eight pieces of advice are : (1) Strong government will not be realized except through the implementation of shari'ah; (2) Sharia cannot be realized except through government; (3) The kingdom will not increase its power except through society (al-rijal); (4) Society will not survive except with wealth (al-mal); (5) Wealth cannot be obtained except by development (al-imarah); (6) Development cannot be achieved except with justice; (7) Justice is the criterion by which God judges human beings; and (8) The government is charged with responsibility for realizing justice.*

Keywords: Ibn Khaldun; Islamic Economics;

Dian Pertiwi,
Ris'an Rusli & Amilda

Abstrak: Tulisan ini melihat Ibnu Khaldun sebagai salah satu pemikir Islam yang membuat perubahan bukan hanya sebagai sosiolog yang merubah melalui tulisan beliau yang sangat bermanfaat sampai saat ini, hal ini memiliki sumbangan yang amat berharga bagi penyusunan sejarah Islam. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai sosiolog dan sejarawan muslim yang menggunakan sejarah sebagai alat analisis untuk menyimpulkan dan menjelaskan permasalahan sosial ekonomi. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum sebab dan akibat untuk menemukan hukum alam yang mengatur masyarakat. Pada bidang ekonomi, Ibnu Khaldun banyak menulis tentang hal-hal yang di masa depan akan menjadi landasan bagi teori ekonomi modern mulai dari ekonomi mikro hingga perdagangan internasional. Beberapa konsep ekonomi yang sudah dibahas antara lain : nilai, harga, uang, pembangunan, distribusi, keuangan publik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi dan manfaat perdagangan. Konsep pembangunan yang dia rumuskan dalam delapan nasihat utama, antara satu dengan yang lain saling terkait. Delapan nasihat itu yaitu : (1) Pemerintahan yang kuat tidak akan tercapai kecuali melalui penegakan syari'at; (2) Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintahan; (3) Kerajaan tidak akan bertambah kekuasaannya kecuali melalui masyarakat (*al-rijal*); (4) Masyarakat hanya akan bertahan dengan kekayaan (*al-mal*); (5) Kekayaan tidak bisa dicapai kecuali dengan pembangunan (*al-imarah*); (6) Pembangunan hanya bisa dicapai dengan keadilan; (7) Keadilan adalah kriteria yang digunakan oleh Allah SWT untuk menilai manusia; dan (8) Pemerintahan bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun; Peradaban Ekonomi Islam;

Pendahuluan

Islam diterima secara universal oleh seluruh manusia sebagai agama sekaligus peradaban (*Islam is both a religion and a civilization*), hal ini dikarenakan Islam bukan saja sebagai agama semata, tetapi juga hal yang menciptakan dan kekuatan spirit hidup menjadi sebuah peradaban besar dunia yang memiliki sejarah yang telah dilalui selama 14 abad. (*Islam is not only a religion; it is also the creator and living spirit of major world civilization with a long history over fourteen centuries*) (Nasr & Huston, 2005).

Bernard Lewis dalam bukunya “*The Arab in History*” menjelaskan bahwa “*Islam – the offspring of Arabia and the Arabian Prophet – was not only a system of belief and cult. It was also a system of state, society, law, thought and art, a civilization with religion as its unifying eventually dominating factor*” (Lewis, 1967). Artinya, Islam dan peradaban merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Agama Islam bukan hanya kepercayaan semata tetapi juga mengatur tentang sistem negara, hidup bermasyarakat, hukum, pemikiran dan seni. Karena sistem yang sudah sangat lengkap itulah Agama Islam akhirnya menjadi salah satu faktor pemersatu yang akhirnya mendominasi di peradaban.

Qosim Nursheha Dzulhadi menjelaskan bahwa peradaban memiliki dua sisi penting: pertama, sisi kemajuan materi (*al-ruqiy al-maddi*), yang meliputi seluruh lini kehidupan semacam: industri (*sina’ah*), perdagangan (*tijarah*), pertanian (*zira’ah*), kerajinan (*ikhtira’*) dan seni (*funun*). Kedua, sisi maknawi (*al-ruqiy al-ma’nawi*), yang berkaitan dengan nilai-nilai

Dian Pertiwi,
Ris'an Rusli & Amilda

spiritual (*al-qiyam al-ruhiyyah*), yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritualitas (*al-qiyam al-ruhiyyah*), kaidah-kaidah moral (*al-qawa'id al-akhlaqiyyah*), produk pemikiran (*al-intaj al-fikri*) dan karya sastra (*al-ibda' al-adabi*) (Dzulhadi, 2015).

Dari definisi tersebut, maka peradaban harus memiliki dua sisi penting ini, nilai ketinggian materil dan spiritual suatu peradaban seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Maka, jika ada satu peradaban yang hanya menonjol dalam satu sisi saja, maka dia tak layak disebut sebagai sebuah peradaban yang sempurna. Karena bisa jadi maju secara industry, teknologi, informasi dan sebagainya, tetapi secara kemanusiaan

Sejarah menceritakan bahwa para sarjana dan ekonom Muslim, seperti Al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Taimiyah (1262-1328), dan Ibnu Khaldun (1332-1404) jauh hari telah menulis beberapa konsep unik dalam karya-karya mereka untuk memecahkan beberapa masalah ekonomi yang telah ada sejak lama seperti masalah tenaga kerja, nilai, pendapatan dan pengeluaran negara, pajak, hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, bahkan sampai ke hukum permintaan dan penawaran. (Aedy, 2011). Ekonom Muslim kontemporer seperti Umer Chapra (1993) juga memberikan konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan* yang menjadi inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara Islam. Kosep ini menerangkan bahwa setiap individu pelaku ekonomi ditentukan oleh pandangan dunia (*worldview*) maupun asumsinya mengenai alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia (Chapra, 1992).

Pada abad ke-14 M, pada sejarah peradaban umat manusia termasuk beberapa kisah yang berkaitan dengan kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa khususnya di dunia Islam, Ibnu Khaldun muncul sebagai seorang tokoh besar yang tampil sebagai politikus dan pelaku sejarah sekaligus memberikan makna sejarah sebagai sebuah tulisan-kisah-sejarah yang berarti bagi kehidupan dan keilmuan masyarakat di dunia Muslim pada beberapa abad kemudian. Dunia keilmuan kemudian melihat bahwa karya-karya Ibnu Khaldun dalam suatu *discourse* terutama dalam kajian ilmu sejarah dan sosiologi, pemikiran Ibnu Khaldun dianggap penting dalam upaya membangun peradaban masyarakat dunia, khususnya di dunia Muslim (Samsinas, 2009).

Ibnu Khaldun adalah seorang ekonom Muslim yang telah memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan ekonomi modern. Beliau diberi gelar sebagai bapak ekonomi karena telah memperkenalkan prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi sebagaimana tertuang dalam tulisannya tentang teori pembagian kerja yang kemudian diadopsi oleh Adam Smith terutama teori-teorinya tentang mekanisme ekonomi, teori nilai, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi dan produksi, teori kelahiran, ekonomi makro, pajak dan kesejahteraan manusia. Ibnu Khaldun juga mengajak untuk mendiskusikan beberapa langkah-langkah dalam pengembangan ekonomi. Ibn Khaldun menjelaskan konsep pengembangan sistem dinamis dimana mekanisme ekonomi mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam jangka Panjang. Singkatnya, ekonomi Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan

Dian Pertiwi,
Ris'an Rusli & Amilda

terhadap perkembangan ekonomi modern (Aswad, 2012).

Biografi Ibnu Khaldun

Sebagai seorang sosiolog dan sejarawan Islam terkenal, Ibnu Khaldun bernama Wali al-Din 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Husain bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim ibn 'Abd al-Rahman ibn Khaldun al-Hadhrami. Silsilahnya terkait dengan sahabat Nabi Wail bin Hajar. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H bertepatan dengan 27 Mei 1332 M dan wafat pada 19 Maret 1407 M dalam usia 73 tahun. Ibnu Khaldun dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan dan juga terpendang. Dia memiliki latar belakang ilmu yang kuat. Beliau belajar ilmu qira'at dari ayahnya. Sementara ilmu yang lain seperti bahasa Arab, hadits dan fikih dipelajari dari berbagai guru yang terkemuka pada masa itu, antara lain: Abu al-Abbas al-Qassar dan Muhammad bin Jabir al-Rawi (Qoyum, et al., 2021).

Situasi politik pada masa hidup Ibnu Khaldun terlihat sedang mengalami masa-masa kelam dan tidak stabil. Tak berselang lama, pemerintahan Islam menurun dan berada di bawah kekuasaan lain. Ketidakstabilan politik ini yang membuat hidupnya harus selalu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Ibnu Khaldun bahkan pernah tinggal dan bekerja untuk Pemerintah Tunisia dan Fez (Maroko), Granada (Islam Spanyol), Bijayah (Afrika Utara) dan Mesir. Tempat kelahiran Ibnu Khaldun, yaitu Wilayah Afrika Utara ini menjadi wilayah

pemberontakan dan kekacauan politik pada Abad Pertengahan abad ke-14.

Ibnu Khaldun merasakan hidup pada masa peradaban Islam yang sedang mengalami kemunduran dan kehancuran. Kekhalifahan Abbasiyah berakhir setelah terjadinya serangan oleh pasukan mongol yang melakukan kekerasan, pembakaran dan penghancuran Baghdad dan sekitarnya pada tahun 1258, 75 tahun sebelum Ibnu Khaldun lahir. Dinasti Mamluk (1250-1517) yang memerintah pada saat itu, Ibnu Khaldun menuliskan karya-karyanya, mempercepat keruntuhannya karena terjadi korupsi dan pemborosan, kecuali untuk periode singkat pada awal masa pemerintahan mereka. Sebagai muslim yang taat, dia menginginkan perubahan. Tetapi dia menyadari bahwa sebagai ilmuwan hal ini tidak bisa dilakukan tanpa mengambil pelajaran dari sejarah sehingga dapat menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pertumbuhan dan penurunan peradaban. Maka lahirlah kitab *Muqaddimah* yang diselesaikan pada tahun 1377 (Chapra, 1999).

Muqaddimah yang berarti pendahuluan, buku ini merupakan pendahuluan dari tujuh jilid buku yang berjudul “*Kitabul Ibar wa Diwanul Mubtada wa Khabar fi Ayyamil Arab wal ‘Ajm wal Barbar wa man ‘Asharahum min Zawil Sulthan al Akbar*” (Kitab Pelajaran dan Catatan Sebab-Akibat dalam Sejarah Arab, Persia, dan Barbar serta para Penguasanya). Kitab ini menjelaskan dasar-dasar yang menjadi penyebab jatuh banggunya suatu dinasti (*daulah*) dan peradaban (*umran*). Tetapi di dalamnya juga

Dian Pertiwi,
Ris'an Rusli & Amilda

terkandung banyak pembahasan tentang ekonomi, sosiologi dan politik (Chapra, 1999).

Pada abad ke-14 ini mengalami kebekuan pemikiran. Hal yang sama berlaku untuk perkembangan intelektual di abad ke-14 yang mengalami pembekuan ide. Pada abad ini bisa dikatakan masa tenang bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karya yang dihasilkan juga hanya berupa *syarh* (penjelasan) atau bahkan *syarh* dari *syarh*. Jadi, masa ini ditinjau dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam dikenal sebagai '*ashr al-syuruh wa al-hawasyi*' (masa pensyarahan dan pemberian catatan pinggir). Maka tidak heran, al-Muqadimah menjadi sebuah karya pemikir muslim yang orisinal dan monumental.

Menurut Al-Hamdi (2006), Ibnu Khaldun bisa menggunakan sejarah sebagai alat analisis untuk melakukan deduksi dan membuat penjelasan tentang masalah-masalah sosial ekonomi. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum sebab dan akibat dalam menemukan hukum alam yang mengatur masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Ibnu Khaldun juga menuliskan banyak tentang hal-hal yang dikemudian hari akan menjadi landasan bagi teori ekonomi modern mulai dari ekonomi mikro hingga perdagangan internasional. Hampir sepertiga dari isi Muqaddimah berisi tentang konsep sosial ekonomi (Hakim, 2007).

Pemikiran Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memiliki beberapa keahlian dalam berbagai macam ilmu, antara lain fikih, sejarah, dan sosiologi. Dia tidak secara khusus menulis di bidang pemikiran ekonomi, tetapi sebagai seorang

sosiolog, dia mengkaji tentang sosiologi dalam bidang ekonomi. Pemikirannya bisa ditemukan pada karya besarnya *al-Muqaddimah*. Buku ini merupakan buku terlengkap pada abad ke-14 M yang sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa yang berisi tentang beberapa pokok pemikiran gejala-gejala sosial masyarakat, sistem pemerintahan dan politik di masyarakat, ekonomi, bermasyarakat dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh lingkungan, geografis dan alat dari ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dalam lintas sejarah perekonomian dunia bahkan menjadi sumber dari pemikiran para tokoh ekonom modern (Qoyum, et al., 2021).

Penelitian ekonomi dengan menggunakan metode analisis sejarah dimulai oleh Ibnu Khaldun (1332-1406 M), Ibnu Khaldun menceritakan bagaimana berbagai peradaban manusia muncul hingga mencapai kejayaannya dan kemudian menghilang. Pajak yang tinggi dianggap sebagai salah satu penyebab rusak atau retaknya sebuah peradaban. Sebaliknya, tarif pajak yang rendah maka akan mendorong produksi, sehingga ekonomi meningkat, sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat. Tarif pajak yang tinggi akan membuat masyarakat berhenti produksi, sehingga ekonomi akan menurun, dan penerimaan pajak akan menurun, maka peradaban juga akan menurun. Ibnu Khaldun juga berpandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak berbisnis/berkompetisi dengan pihak swasta, karena pihak swasta akan bisa kalah dengan mudah. Hal ini merupakan *disincentive* bagi pihak swasta untuk

Dian Pertiwi,
Ris'an Rusli & Amilda

berproduksi/berdagang, yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak pemerintah (Ibrahim et al., 2021).

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa Allah SWT telah menyiapkan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia harus bekerja untuk mendapatkan hal-hal tersebut untuk mendapatkan manfaat serta kebutuhan hidupnya. Dalam menciptakan kebutuhan manusia, hal ini tidak bisa dilakukan secara sendirian, tetapi perlu dikerjakan secara kolaborasi atau bersama-sama dengan manusia lainnya. Ibnu Khaldun memberikan contoh pada pembuatan roti, dalam memproduksi roti diperlukan sejumlah pekerjaan yang mengharuskan adanya kolaborasi beberapa orang. Inilah pentingnya spesialisasi pekerjaan (*division of labor*). Beliau juga menyebutkan tentang perdagangan internasional, karena adanya perbedaan keahlian antar-kota/negara (Ibrahim et al., 2021).

Konsep Pembangunan Ekonomi Ibnu Khaldun

Konsep yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Ibnu Khaldun untuk pembangunan adalah *'umran al-'alam* (memakmurkan dunia). Kemakmuran ini berasal dari tiga unsur, yaitu sejarah, kerja sama masyarakat dan alam semesta. Ketiga unsur ini digerakkan oleh semangat *'ashabiyah* atau yang disebut dengan persaudaraan/solidaritas yang akan melahirkan negara dan kemakmuran.

Menurutnya, konsep pembangunan bersifat universal. Inilah konsep pembangunan yang menyatukan fisik dan mental, dan bukan pembangunan yang selalu diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang dilihat hanya mengutamakan pembangunan fisik

semata. Konsep pembangunan ekonomi tersebut terdapat di dalam karya Ibn Khaldun (*al-Muqaddimah*) disebut dengan istilah delapan nasihat utama, meliputi (Chapra, 2008):

1. Pemerintah yang kuat tidak akan terealisasi kecuali melalui pelaksanaan syari'at;
2. Syariat tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan;
3. Kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat (*al-rijal*);
4. Masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan (*al-mal*);
5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-imarah*);
6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan;
7. Keadilan adalah kriteria yang mana digunakan oleh Tuhan untuk menilai manusia; dan
8. Pemerintahan dibebankan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.

Berdasarkan nasehat dari Ibnu Khaldun tentang pembangunan ekonomi yang tertuang pada kitab *Muqaddimah*. Ibnu Khaldun memberikan penjelasan tentang delapan prinsip tersebut agar lebih mudah dipahami. Karena itu, pemikiran yang bersifat multidisiplin dan juga dinamis karena mengandung nilai-nilai religius. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun yang dapat menintegrasikan semua variabel penting sosial, ekonomi dan juga politik, berikut beberapa usulan terhadap konsep pembangunan

Dian Pertiwi,
Ris'an Rusli & Amilda

ekonomi Islam yang dikemukakan Ibnu Khaldun (Arifqi, 2019):

Pertama, Peran masyarakat atau manusia (*ar-rijal*), manusia memiliki ciri-ciri khusus yaitu : (a) manusia memiliki pengetahuan dan keahlian yang merupakan hasil dari pemikiran dan berfikir; (b) manusia membutuhkan pengaruh yang sanggup mengendalikan dirinya, dan kepada kekuasaan yang kokoh, sebab tanpa memiliki itu (seperti organisasi masyarakat atau ijtima insani) maka eksistensinya nihil, (c) manusia bisa melakukan berbagai usaha untuk mencari nafkah; dan terakhir (d) manusia menginginkan peradaban yang maju (Khaldun, 2000).

Kedua, Peran pembangunan atau *al-imarah* dan keadilan atau *al-adl*, yaitu Ketika manusia menjadi pusat analisis, maka pembangunan dan keadilan menjadi hubungan paling penting dalam rangkaian sebab dan akibat yang bangkit dari runtuhnya suatu negara. Pembangunan ekonomi sangat penting karena tanpa adanya perbaikan nyata dalam peningkatan kesejahteraan untuk rakyat, maka mereka tidak akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan lebih bermanfaat. Selain itu, dengan tidak adanya pembangunan, masuknya cendekiawan, seniman, tenaga kerja dan modal yang harus diadakan dari masyarakat lebih lanjut akan menjadi tantangan suatu negara karena tidak adanya pembangunan (Arifqi, 2019).

Ketiga, sebaik apapun sebuah regulasi peraturan, peran Lembaga dan pemerintahan tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan secara adil dan tidak memihak. Syariah pada hakikatnya hanya bisa memberikan sebuah aturan dalam masyarakat, ia tidak

dapat berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu diperlukan sebuah otoritas yang bisa menjalankan semua aturan, petunjuk dan juga pedoman. Menurut Ibnu Khaldun, *al-mulk* memiliki arti kerajaan yang aman dimana seharusnya seorang pengusaha bisa membela dan berpihak pada rakyatnya untuk membantu mewujudkan kesejahteraan negaranya (Arifqi, 2019).

Keempat, peran dari kekayaan (*al-mal*) memiliki peranan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan yang lain, karena kekayaan bisa menyediakan bahan utama yang diperlukan untuk menjamin kelancaran tercapainya keadilan dan pembangunan yang berjalan dengan baik, memacu efektifitas pelaksanaan aturan-aturan oleh pemerintah, serta terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kekayaan tidak tergantung pada satu pos tertentu. Dalam analisisnya, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesifikasi untuk membangun ekonomi secara Bersama-sama dengan mengedepankan konsep kerjasama (Arifqi, 2019).

Bisa disimpulkan bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan sebagai terjaga dan terpeliharanya agama, akal, jiwa, keturunan, harta, lingkungan dan kehormatan. Ibnu Khaldun, menganggap bahwa masyarakat sebagai aktor/pemain utama dalam mencapai kemakmuran. Faktor penting dalam terwujudnya kemakmuran adalah memiliki keahlian dalam bidang tertentu, sehingga terpenuhi berbagai kebutuhannya (Qoyum et al., 2021).

Pembangunan berperan sebagai pendorong semangat masyarakat untuk meningkatkan

Dian Pertiwi,
Ris'an Rusli & Amilda

produktivitas. Seiring dengan pembangunan yang meningkat, maka berbagai sarana prasarana juga akan semakin banyak, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, pasar dan fasilitas umum yang telah tersedia. Ketersediaan fasilitas ini akan sangat berpengaruh pada kualitas hidup dan produktivitas. Dengan bertumbuhnya produktivitas maka akan bertumbuh juga tabungan masyarakat dan pendapatan negara melalui sektor pajak (Qoyum et al., 2021).

Pembangunan selalu terkait dengan keadilan. Pembangunan yang maju tanpa dibarengi dengan keadilan akan melahirkan konflik di tengah masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun tidak terbatas pada bidang ekonomi, tetapi mencakup segala bidang. Pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa menjadi faktor penentu dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan. Keseimbangan dan kesinambungan akan terwujud, jika pemerintah berpegang teguh kepada syariat. Jadi, keseluruhan struktur pembangunan tersebut harus diikat dan dibalut dengan semangat *'ashabiyah*. Dengan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong ini maka semua persoalan bisa dihadapi dan semua tujuan bisa diwujudkan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun (Qoyum et al., 2021).

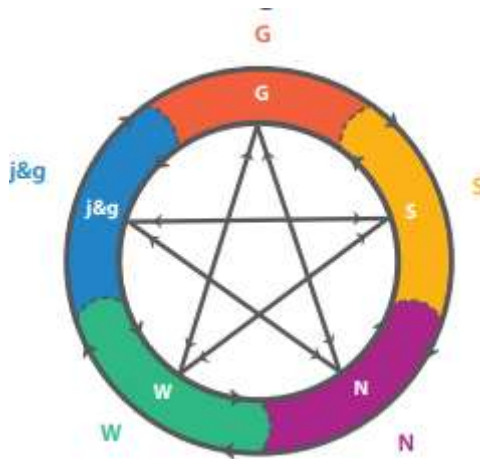
Ekonomi dan Peradaban

Ibnu Khaldun mengembangkan teori tentang siklus dinasti yang sangat komprehensif, teori ini menjelaskan bagaimana terjadinya perubahan pada semua aspek kehidupan masyarakat dimulai pada masa kebangkitan, puncak kekuasaan, penurunan, dan

kehancuran dari dinasti penguasa (Alrefai & Brun, 1994). Perkembangan peradaban ini merupakan kontinum dari *badawah* (gaya hidup antara suku-suku) pada satu kutub dan *hadarah* (gaya hidup menetap suku) pada kutub yang lain. Dalam sistem *Badawah*, masyarakat kecil terikat bersama-sama oleh ikatan keluarga, budaya dan agama. Lembaga yang tercipta atau terorganisir juga masih bersifat sederhana tetapi sangat efektif dalam mengakomodasi seluruh kegiatan ekonomi. Agama juga dalam mengatur standar perilaku para pemain sementara struktur politik maupun aturan formal biasanya dianggap tidak penting.

Terkait dengan teori pembangunan ekonomi Ibnu Khaldun ini, M. Umer Chapra menyebutkannya dengan *circle of equity* (lingkaran keadilan). Ia menjelaskan tentang hubungan yang saling terkait satu sama lain dalam upaya memajukan atau malah memundurkan sebuah peradaban. Lingkaran keadilan tersebut, beliau rumuskan sebagai berikut (Chapra, 2008):

Dian Pertiwi,
Ris'an Rusli & Amilda



Gambar 1. *Circle of Equity* (Lingkaran Keadilan)
Sumber : M. Umer Chapra, 2008.

Secara matematis model ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$$

Keterangan:

- G : *Government/al-mulk* (pemerintah)
- S : *Syari'ah*
- W : *Wealth/al-maal* (harta)
- N : *Nation/al-rijal* (masyarakat atau rakyat)
- g : *Development/al-'imarah* (pembangunan)
- J : *Justice/al-'adl* (keadilan)

Semua komponen atau variabel pada gambar di atas berada dalam sebuah lingkaran yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Sebuah peradaban akan maju atau mundur sangat ditentukan oleh setiap variabel tersebut. Konsep pemikiran Ibnu Khaldun

tentang lingkaran keadilan mempunyai keunikan yaitu tidak ada dugaan yang dianggap tetap seperti yang diajarkan ekonomi konvensional saat ini. Karena tidak ada variabel yang tetap, satu variabel dapat menjadi pemicu, sedangkan variabel yang lain bisa terpicu atau tidak dalam arah yang sama, karena kegagalan di sebuah variabel tidak dapat langsung menyebar dan menimbulkan dampak kemunduran, tetapi bisa diperbaiki. Bila variabel yang rusak cepat diperbaiki, maka arah bisa berubah menuju kemajuan Kembali. Sebaliknya, jika kerusakan pada salah satu variabel tidak bisa diperbaiki atau lambat diperbaiki, maka perputaran lingkaran menjadi melawan arah jarum jam menuju kemunduran (Fitriani, 2019).

Pemahaman Syariah (S) yang di dalamnya terkandung aspek ibadah, akhlak, dan mu'amalah Ketika disampaikan dan diamalkan oleh masyarakat; Pelaksanaan penelitian yang kemudian diterapkan pada kehidupan ekonomi masyarakat (N). Jika kehidupan ekonomi rakyat meningkat dibarengi dengan kesadaran syari'ah, pasti kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan (W) masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat yang sejahtera dan memiliki kesadaran syari'ah, maka dengan mudah dapat mengamalkan anjuran syari'ah seperti membayar zakat, infaq, sedekah dan wakaf sehingga keadilan dan keseimbangan ekonomi terwujud. Di samping itu, masyarakat yang sejahtera akan dengan mudah melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung segala macam kegiatan seperti fasilitas Lembaga Pendidikan, ibadah dan transportasi. Pembangunan yang dilakukan tersebut

Dian Pertiwi,
Ris'an Rusli & Amilda

akan mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Pada saat ekonomi kuat maka pemerintahan (G) dapat berjalan dengan baik. Melalui rumusan tersebut M. Umer Chapra juga menjelaskan bahwa pangkap kemunduran peradaban Islam Ketika pemerintah (G) melupakan kewajiban dan tanggung jawab karena tidak menerapkan syari'ah (S) sebagai tuntunan dalam berbagai bidang terutama ekonomi. Keadilan (J) dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat (N) tidak dipenuhi secara merata oleh pemerintah (Chapra, 2008).

Kesimpulan

Ibnu Khaldun yang dikenal sebagai sejarawan dan sosiolog muslim yang menggunakan sejarah sebagai alat analisis untuk melakukan deduksi dan membuat penjelasan dan jawaban-jawaban tentang masalah-masalah sosial ekonomi. Dia memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum sebab dan akibat untuk menemukan hukum alam yang mengatur masyarakat sekitar. Dalam bidang ekonomi, Ibnu Khaldun menulis banyak hal yang dikemudian hari teori ini akan menjadi menjadi landasan bagi teori ekonomi modern mulai dari ekonomi mikro hingga perdagangan internasional. Berikut beberapa konsep ekonomi yang sudah dibahas oleh beliau, antara lain : nilai, harga, uang, pertumbuhan, pembangunan, distribusi, keuangan publik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi dan manfaat perdagangan. Konsep pembangunan yang ia tawarkan terformulasikan dalam delapan nasihat utama, antara satu dengan yang lain saling terkait. Delapan nasihat itu adalah: (1)

Pemerintah yang kuat tidak akan terwujud kecuali melalui pelaksanaan syari'at: (2) Syariah tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan; (3) Kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat (*al-rijal*); (4) Masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan (*al-mal*); (5) Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-imarah*); (6) Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan; (7) Keadilan adalah kriteria yang mana digunakan oleh Tuhan untuk menilai manusia; dan (8) Pemerintahan dibebankan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.

Daftar Pustaka

- Aedy, H. (2011). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam : Sebuah Studi Komparasi*. Graha Ilmu.
- Alrefai, A., & Brun, M. (1994). Ibn Khaldun : Dynastic Change and Its Economic Consequences. *Arab Studies Quarterly*, 16(2).
- Arifqi, Moh. M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra). *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 125–138.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and The Economic Challenge*. International Islamic Publishing House.
- Chapra, M. U. (1999). Socioeconomic and Political Dynamics in Ibn Khaldun's Thought. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 16(4).

- Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's Theory of Development : Does it Help Enplain The Law Performance Present-Day Muslim World. *The Journal of Economic-Social*, 37.
- Fitriani, R. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2(2), 128–142.
- Hakim, C. M. (2007, November 3). Ibn Khaldun's Thought in Microeconomics : Dynamic of Labor, Demand-Supply and Prices. Economics Development An Analysis based on Selected Economic Issues. *International Conference in Ibn Khaldun in Madrid, Spain*.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. Ismal, A. Sakti, M. S. Nurzaman, & L. Tamanni, Eds.; Edisi Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Khaldun, I. (2000). *Muqaddimah*. Pustaka Firdaus.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparin, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (A. Sakti, S. E. Hidayat, & S. Samidi, Eds.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.